



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : 1. Ketua Serikat Pekerja Dirgantara;
2. Ketua Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia;
3. Ketua Forum Komunikasi Pensiun Telkom;
4. Ketua Serikat Pekerja PT. PLN (Persero);
5. Sekretaris Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran
Jawa Timur.
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Rabu, 19 Januari 2011
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : Audiensi
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 35 orang dari 45 Anggota Komisi IX DPR RI. 1 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Serikat Pekerja Dirgantara, Ketua Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Pensiun Telkom, Ketua Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) dan Sekretaris Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur dibuka pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Forum komunikasi pensiunan PT. Telkom yang mewakili para pensiunan karyawan PT. Telkom yang memasuki masa pensiun sejak tanggal 1 Februari 2009, menyampaikan masalahnya tentang belum dibayarkannya dana manfaat pensiun dengan azas uni formula oleh PT. Telkom. Mereka berdalih belum ada kesepakatan antara PT. Telkom dengan Serikat Karyawan (Sekar). Pada sisi lain, karyawan yang sudah pensiun tidak lagi menjadi anggota Sekar.

2. Serikat Karyawan PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan permasalahan yang dialami para karyawan PT. Dirgantara Indonesia, yaitu:
 - a. Masalah gaji karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang belum dibayarkan sejak bulan Oktober 2010.
 - b. Masalah dana pensiun, kekurangan manfaat pensiun yang belum dibayarkan.
 - c. Belum dilaksanakannya pembayaran (belum disetorkan) kekurangan iuran jaminan hari tua karyawan PT. Dirgantara Indonesia ke badan penyelenggara PT. Jamsostek.
3. Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pensiunan kepada para mantan pekerja PT. Dirgantara Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena perhitungan pembayaran pensiun didasarkan kepada gaji pokok tahun 1991, sedangkan Serikat Pekerja meyakini perhitungan pembayaran pensiun seharusnya didasarkan kepada gaji pokok tahun terakhir, sehingga para pensiun hanya mendapat pembayaran Rp. 400 ribuan s/d Rp. 700 ribuan per bulan. Sedangkan menurut perhitungan gaji akhir, seharusnya para pensiun mendapat tunjangan pensiun Rp. 3 jutaan per bulan.
4. Permasalahan yang dialami oleh Serikat Karyawan dan Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia sudah disampaikan kepada Komisi VI DPR RI melalui RDPU, Komisi VI DPR RI telah merekomendasikan masalah tersebut untuk diselesaikan kepada Kementerian Negara BUMN. Permasalahan ini juga sudah disampaikan kepada Lembaga Obudsman.
5. Serikat Pekerja PT. PLN menyampaikan adanya praktek pembentukan Serikat Pekerja tandingan (*union busting*) dalam lingkup PT. PLN, sehingga meresahkan para karyawan PT. PLN.
6. Jaringan Peduli Buruh Migran Jawa Timur menyampaikan adanya praktek pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Surya Pacific Jaya, yang mengirimkan tenaga kerja ke negara Macau dengan cara menipu calon TKI. Para TKI yang tiba di Macao ternyata belum mendapatkan tujuan tempat kerja/majikan dan dipajang dietalase untuk ditawarkan kepada calon majikan. Banyak diantara para TKI tidak memperoleh gaji dikarenakan mereka selalu berpindah majikan atas inisiatif agen pekerja, bahkan ada diantara mereka yang terjerumus dalam praktek prostitusi. Oleh karena itu Jaringan Peduli Buruh Migran Jawa Timur mendesak agar Pemerintah bertindak tegas terhadap PT. Surya Pacific Agung.
7. Komisi IX DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait permasalahan para pekerja dan para pensiunan dalam Raker, RDP dan RDPU, termasuk melakukan *on the spot*, sehingga Komisi IX DPR RI akan mendapatkan masukan yang lebih lengkap dan berimbang guna mempermudah penyelesaian masalah para pekerja dan pensiunan tersebut.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Forum komunikasi Pensiun Telkom, Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia, Serikat Pekerja Dirgantara

Indonesia, Serikat Pekerja PT. PLN dan Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur untuk memperoleh hak-hak mendasar sebagai pekerja.

2. Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti setiap kasus ketenagakerjaan yang telah disampaikan di atas kepada Kemenakertrans RI melalui Rapat Kerja dan pihak-pihak terkait lainnya melalui Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu :
- Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi VI DPR RI untuk memanggil Dirut PT. PLN, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Telkom untuk menyelesaikan pengaduan serikat pekerja tersebut.
 - Komisi IX DPR RI akan melakukan on the spot dan memanggil PT. Surya Pacifik Jaya untuk mempertanggungjawabkan kasus pengiriman TKI di Macao.
 - Komisi IX DPR RI akan memanggil PT. Jamsostek untuk meminta penjelasan persoalan pembayaran tunjangan hari tua para pekerja yang belum dibayar.

Rapat diakhiri pukul 16.05 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING